

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023
AUDITED

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu - Bengkulu 38225

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bengkulu, 30 April 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,

Nursani



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel dan Lampiran	6
Pernyataan Tanggung Jawab	9
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum.....	23
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu.....	23
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	24
A.3. Basis Akuntansi	24
A.4. Dasar Pengukuran	24
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap	42
C.3. Aset Lainnya	48
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	49
C.5. Ekuitas.....	50
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	51
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	51
D.2. Beban Pegawai.....	51

D.3.	Beban Persediaan.....	52
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	52
D.5.	Beban Pemeliharaan	53
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	54
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	54
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	55
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	56
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	56
D.11.	Beban Lain-lain.....	57
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	57
D.13.	Pos Luar Biasa	58
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	59
E.1.	Ekuitas Awal	59
E.2.	Surplus (Defisit) LO.....	59
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	59
E.4.	Koreksi Menambah/Mengurangi	59
E.4.1.	Penyesuaian Nilai Aset	59
E.4.2.	Koreksi Nilai Persediaan	59
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	61
	Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2022 disajikan pada lampiran.....	63
E.6.	Ekuitas Akhir	63
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	63
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	63
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	63
	Laporan-laporan Pendukung.....	65
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	66
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	69

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	27
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	30
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	31
Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	33
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2023	33
Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2023 dan 2022	34
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023	35
Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023.....	35
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022	36
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022	36
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022.....	37
Tabel 14 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022	38
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022	38
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022	39
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022	39
Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022.....	40
Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	40
Tabel 20 Rincian Uang Muka Belanja	41
Tabel 21 Rincian Piutang Bukan Pajak.....	41
Tabel 22 Rincian Aset Tetap	42
Tabel 23 Rincian Saldo Tanah.....	43
Tabel 24 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 25 Rincian Aset Lainnya	48
Tabel 26 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022	49
Tabel 27 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga.....	49
Tabel 28 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2023.....	51
Tabel 29 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022	51
Tabel 30 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022.....	52
Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022	53
Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022	54
Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022.....	54
Tabel 34 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	55
Tabel 35 Rincian Beban Bantuan Sosial	55
Tabel 36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	56
Tabel 37 Rincian Beban Piutang tak Tertagih	56
Tabel 38 Rincian Beban Lain-lain.....	57
Tabel 39 Rincian Kegiatan Non Operasional.....	57
Tabel 40 Rincian Pos Luar Biasa	58
Tabel 41 Rincian Koreksi Nilai Persediaan	60

Tabel 42	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023	60
Tabel 43	Rincian Koreksi Lain-lain	61
Tabel 44	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas.....	61
Tabel 45	Rincian Transfer Masuk	62
Tabel 46	Rincian Pengesahan Hibah.....	62
Tabel 47	Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	67

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585 E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bengkulu, 30 April 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,

Nursani



RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.32,772,603 atau mencapai 134 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.24,478,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp.21,417,958,963 atau mencapai 99.9 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.21,471,775,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	24,478,000	32,772,603	134	143.452.704
Belanja Negara	21,471,775,000	21,417,958,963	99	21.068.907.351

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 dan 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.35,135,246,839,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.23,571,400,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.35,111,675,439,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.8,391,890,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 8,391,890,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.35,135,246,839.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	23,571,400	47.682.459	(24,111,059)	(50.57)
Aset Tetap	35,111,675,439	35.018.173.250	93,502,189	(0.27)
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	35,135,246,839	35.065.855.709	69,391,130	(0.2)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	8,391,890	5.458.730	2,933,160	53.73
Kewajiban Jangka Panjang		0		
Jumlah Kewajiban	8,391,890	5.458.730	2,933,160	53.73
Ekuitas				
Ekuitas	35,126,854,949	35.060.396.979	66,457,970	0.19
Jumlah Ekuitas	35,126,854,949	35.060.396.979	66,457,970	0.19
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	35,135,246,839	35.065.855.709	69,391,130	0.20

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.34,765,936,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.21,453,975,576,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(21,419,209,640,-).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.(0,-) dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(21,419,209,640,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.35,060,396,979,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(21,419,209,640,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(0,-) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.21,485,667,610,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.35,126,854,949,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	24,478,000	32,772,603	143.452.704	
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		24,478,000	32,772,603	143.452.704	
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	18,048,711,000	18,000,872,239	17.029.504.233	
2.	Belanja Barang	B.2.2.	3,006,027,000	3,000,616,674	3.218.592.124	
3.	Belanja Modal	B.2.3.	417,037,000	416,470,050	820.810.994	
	Jumlah Belanja Negara		21,471,775,000	21,417,958,963	21.068.907.351	

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.1. 2.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	0	0
Persediaan	C.1. 4.	23,571,400	47.682.459
Jumlah Aset Lancar		23,571,400	47.682.459
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	28,332,813,000	28.332.813.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	5,294,877,665	4.803.107.615
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	9,660,923,000	9.660.923.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	18,680,950	18.680.950
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(8,598,351,019)	(7.797.351.315)
Jumlah Aset Tetap		34,708,943,596	35.018.173.250
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3. 1.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		34,732,514,996	35.065.855.709
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	8,391,890	3.465.397
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4. 2.	0	1.993.333
Uang Muka dari KPPN	C.4. 3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8,391,890	5.458.730
Jumlah Kewajiban		8,391,890	5.458.730
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	34,724,123,156	35.060.396.979
Jumlah Ekuitas		34,724,123,156	35.060.396.979
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		34,732,514,996	35.065.855.709

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	34,765,936	27.430.980
Jumlah Pendapatan		34,765,936	27.430.980
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	18,007,723,139	17.030.078.233
Beban Persediaan	D. 3	73,687,100	87.046.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1,876,521,980	1.925.351.626
Beban Pemeliharaan	D. 5	895,726,006	749.473.251
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	215,118,190	444.956.909
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	787,930,954	847.978.779
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		21,856,707,369	21.084.884.798
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(21,821,941,433)	(21.057.453.818)
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(0)	(24.126.843)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	70.645.884

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	46.519.041
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(21,821,941,433)	(21.010.934.777)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(21,821,941,433)	(21.010.934.777)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	E.1	30,060,396,979	35.091.699.254
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(21,821,941,433)	(21.010.934.777)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E.3	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	0	(75.120.895)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
Jumlah Koreksi Ekuitas		0	• 0
Transaksi Antar Entitas	E.5	21,485,667,610	21.054.753.397
Ekuitas Akhir		34,724,123,156	35.060.396.979

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas_pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan

jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	24,478,000	24,478,000
Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah	24,478,000	24,478,000
Belanja		
Belanja Pegawai	17,166,850,000	18,048,711,000
Belanja Barang	3,007,079,000	3,006,027,000
Belanja Modal	0	417,037,000
Jumlah Belanja	20,173,929,000	21,471,775,000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah: Rp.
32,772,603*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.32,772,603 atau mencapai 134 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.24,478,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	24,478,000	24,905,677	101.75
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	7,767,567	0

3.	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0	99,359	0
Total Pendapatan		24,478,000	32,772,603	133.89

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(110,680,101). atau 77.15 persen dibandingkan periode yang sama TA 2022.

Hal ini disebabkan karena pada TA 2023 tidak terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin melalui proses Lelang serta besarnya nilai Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL yang terdapat pada TA 2022.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	43,382,507	(43,382,507)	(100)
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	24,905,677	29,424,313	(4,518,636)	(15.36)
3.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7,767,567	0	7,767,567	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	70,645,884	(70,645,884)	(100)
5.	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	99,359	0	99,359	0
Total Pendapatan		32,772,603	143,452,704	(110,680,101)	(77.15)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara : Rp.
21,417,958,963

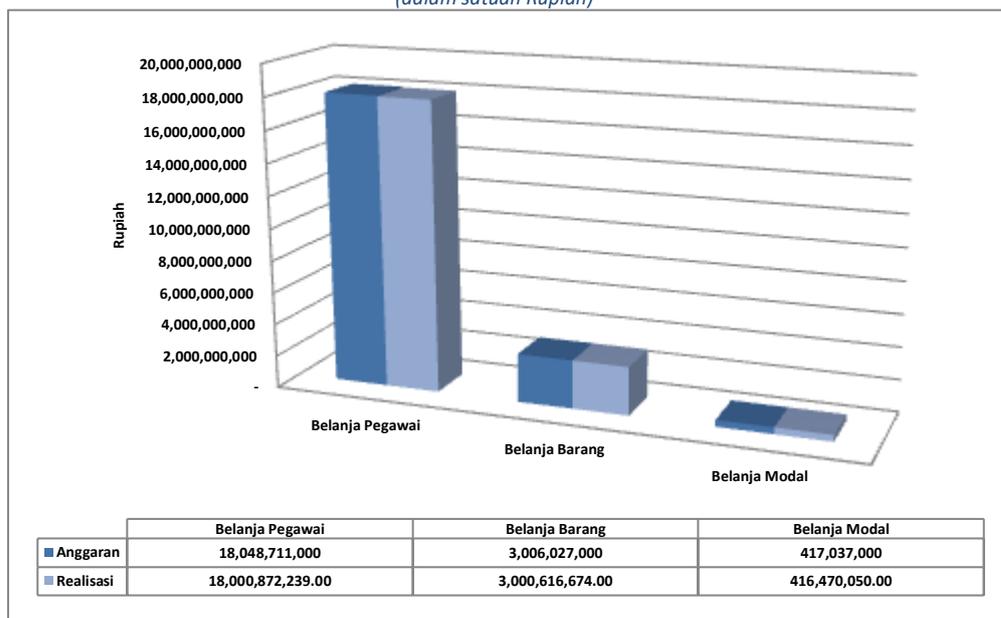
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp.21,417,958,963 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99.9% dari anggaran senilai Rp.21,471,775,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	18,048,711,000	18,032,737,269	99.9
Belanja Barang	3,006,027,000	3,000,616,754	99.8
Belanja Modal	417,037,000	416,470,050	99.8
Total Belanja Bruto	23.440.400.000	21,068,907,351	99.9
Pengembalian Belanja	0	31,865,110	0
Total Belanja Netto	23.440.400.000	21,417,958,963	99.9

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan SAKTI Tahun 2023 & 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp349,051,612 atau sebesar 1.66 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk Belanja Modal Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Tahun 2023.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	18,000,872,239	17,029,504,233	971,368,006	5.70
Belanja Barang	3,000,616,674	3,218,592,124	(217,975,450)	(6.77)
Belanja Modal	416,470,050	820,810,994	(404,340,944)	(49.26)
Total Belanja	21,417,958,963	21,068,907,351	349,051,612	1.66

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp.
18,000,872,239

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.18,000,872,239 dan Rp. 17,029,504,233.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp971,368,006 atau 5.70 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pembayaran kekurangan Belanja Tunjangan Fungsional Hakim Tahun 2022 yang dimintakan pada Tahun 2023 dan adanya promosi mutasi Hakim Tinggi ke Pengadilan Tinggi Bengkulu di Tahun 2023.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4,246,809,940	4,397,564,752	(150,754,812)	(3.43)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	58,282	56,389	1,893	3.36
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	329,548,640	346,973,556	(17,424,916)	(5.02)
Belanja Tunj. Anak PNS	69,036,322	62,861,169	6,175,153	9.82
Belanja Tunj. Struktural PNS	91,845,000	93,870,000	(2,025,000)	(2.16)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,604,602,000	8,616,164,000	988,438,000	11.47
Belanja Tunj. PPh PNS	1,809,990,000	1,678,281,932	131,708,068	7.85
Belanja Tunj. Beras PNS	182,867,580	188,081,820	(5,214,240)	(2.77)
Belanja Uang Makan PNS	573,351,000	601,036,000	(27,685,000)	(4.61)
Belanja Tunjangan Umum PNS	49,555,000	52,105,000	(2,550,000)	(4.89)
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,075,200,000	993,000,000	82,200,000	8.28

Belanja Uang Lembur	0	0	0	
Total Belanja Brutto	18,032,737,269	17,029,994,618	1,002,742,651	5.89
Pengembalian Belanja	31,865,030	490,385	31,374,645	6397.96
Total Belanja Netto	18,000,872,239	17,029,504,233	971,368,006	5.70

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang : Rp.
3,000,616,674

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp3,000,616,674 dan Rp3,218,592,124.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 6.77 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain karena menurunnya pagu anggaran untuk Belanja Barang pada DIPA Pengadilan Tinggi Bengkulu di TA 2023, dimana pada TA 2022 terdapat Pagu Anggaran untuk kegiatan Bimtek Kesekretariatan yang tidak terdapat pada Tahun 2023 ini.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	788,082,049	796,509,625	(8,427,576)	(1.06)
Belanja Barang Non Operasional	77,177,000	42,891,950	34,285,050	79.93
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	66,966,900	103,995,070	(37,028,170)	(35.61)
Belanja Jasa	974,937,388	1,100,611,720	(125,674,332)	(11.42)
Belanja Pemeliharaan	878,335,227	729,626,850	148,708,377	20.38
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	215,118,190	444,956,909	(229,838,719)	(51.65)
Total Belanja Brutto	3,000,616,754	3,218,592,124	(217,975,370)	(6.77)
Pengembalian Belanja	80	0	80	0
Total Belanja Netto	3,000,616,674	3,218,592,124	(217,975,450)	(6.77)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal :
Rp.416,470,050.

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp416,470,050 dan Rp820,810,994. Realisasi Belanja Modal pada

Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan antara lain menurunnya pagu anggaran Belanja Modal pada TA 2023. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 14 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	416,470,050	657,970,994	(241,500,944)	(36.70)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	162,840,000	(162,840,000)	(100)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	416,470,050	820,810,994	(404,340,944)	(49.26)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	416,470,050	820,810,994	(404,340,944)	(49.26)

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2022.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0

Total Belanja Netto	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp.416,470,050, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 pada periode yang sama.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	416,470,050	657,970,994	(241,500,944)	(36.70)
Total Belanja Brutto	416,470,050	657,970,994	(241,500,944)	(36.70)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	416,470,050	657,970,994	(241,500,944)	(36.70)

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp162,840,000. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan Realisasi TA 2022 karena di Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mendapatkan anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada satker Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Penambah Daya Listrik dan Jaringan	0	162,840,000	(162,840,000)	(100)
Total Belanja Brutto	0	162,840,000	(162,840,000)	(100)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	162,840,000	(162,840,000)	(100)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar:
Rp23,571,400,-

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23,571,400 dan Rp.47,682,459. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Persediaan	23,571,400	47,682,459
Total Aset Lancar	23,571,400	47,682,459

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	-----	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Uang Muka Belanja (prepayment)

Uang Muka Belanja
(prepayment): Rp.0

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment)

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2022	31 Desember TA 2021
1.	-----	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak: Rp.0

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Piutang Bukan Pajak
TA 2023

No.	Debitur	31 Desember 2023	31 Desember TA 2022
1.	-----	0	0
Jumlah Total		0	0

C.1.4. Persediaan

Persediaan :
Rp23,571,400,-

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp23,571,400,- dan Rp47,682,459,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai

berikut:

Tabel 22 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	21,663,900	44,524,000
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	1,887,500	3,158,459
	Total	23,571,400,-	47,682,459

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
35,111,675,439*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp35,111,675,439 dan Rp35,018,173,250. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan
1	Tanah	28.332.813.000	28.332.813.000	0
2	Peralatan dan Mesin	5,294,877,665	4,803,107,615	491,770,050
3	Gedung dan Bangunan	9,660,923,000	9,660,923,000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	18.680.950	18.680.950	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	42,815,524,565	42,815,524,565	491,770,050
	Akumulasi Penyusutan	(8,598,351,019)	(7,797,351,315)	(398,267,861)
	Nilai Buku Aset Tetap	34,708,943,596	35,018,173,250	93,502,189

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp.28.332.813.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.28.332.813.000 dan Rp.28.332.813.000. Nilai Perolehan Aset berupa Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.28.332.813.000 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Mutasi transaksi terhadap Tanah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	28.332.813.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2023	28.332.813.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	28.332.813.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.01.002.1	1.195	A 1429085	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	491.231.000
2.	2.01.01.01.002.2	2.010	A 1429094	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	904.886.000
3.	2.01.01.01.002.3	1.933	A 1430646	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas KPT dan WKPT	4.747.422.000
4.	2.01.01.01.002.4	586	07.04.03.09.4.00011	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	1.480.378.000
5.	2.01.01.04.001.1	8.958	07.04.03.04.4.00083	Pemerintah RI cq. MARI	Gedung Kantor PT Bengkulu	20.710.896.000
Jumlah						28.332.813.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
5,294,877,665*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5,294,877,665 dan Rp4,803,107,615.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	4,803,107,615
Mutasi Tambah	
Pembelian	391,288,800
Hibah Masuk	9,000,000
Transfer Masuk	91,481,250
Reklas Masuk	6,600,000
Mutasi Kurang	
Reklas Keluar	6,600,000
Saldo per 31 Desember 2023	5,294,877,665
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(4,320,539,961)
Nilai Buku 31 Desember 2023	974,337,704

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp391,288,800. Mutasi nilai aset Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi tambah :

Reklasifikasi Masuk dari koreksi pencatatan atas kesalahan input kode barang berupa 4 unit Dispenser senilai Rp.6,600,000,-;

Transfer Masuk berupa 1 unit Server senilai Rp.84,700,000,-; 1 unit Scanner senilai Rp.19,850,000,-

Hibah Barang berupa 2 unit Water Heater senilai Rp9.000.000,-;

Pembelian Barang berupa 3 unit Lampu Kristal senilai Rp25,150,000,-; 3 unit Meja Kerja Kayu senilai Rp 67,392,000,-; 12 unit Kursi Besi/Metal senilai Rp 38,940,000,-; 1 unit Partisi senilai Rp 19,399,000,-; 1 unit Tape Recorder senilai Rp 16,504,050,-; 1 unit Microphone senilai Rp 2,435,000,-; 2 unit Digital LED Running Text senilai Rp 21,900,000,-; 2 unit Video Wall senilai Rp 177,500,000,-;

Mutasi kurang :

Reklasifikasi Keluar dari koreksi pencatatan atas kesalahan input kode barang senilai Rp.6,600,000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
9,660,923,000,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.9,660,923,000,- dan Rp.9,660,923,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	9,660,923,000
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai	0
Belanja Modal	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(4,277,811,058)
Nilai Buku 31 Desember 2022 3	5,383,111,942

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.9,660,923,000, tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya karena tidak adanya alokasi anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023 ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi,
dan Jaringan : Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp.18.680.950*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 18.680.950,- dan Rp. 18.680.950,-.

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.18.680.950,- terdiri dari Aset Monografi, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	18.680.950
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	
Penghapusan Aset	0
Saldo per 31 Desember 2023	18.680.950
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	18.680.950

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. (8,598,351,019)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.(8,598,351,019) dan Rp.(7,797,351,315).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	28,332,813,000	0	28,332,813,000
2	Peralatan dan Mesin	5,294,877,665	(4,320,539,961)	974,337,704
3	Gedung dan Bangunan	9,660,923,000	(4,277,811,058)	5,383,111,942
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	18.680.950	0	18.680.950
	Jumlah	43,307,294,615	(8,598,351,019)	34,708,943,596

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 27 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	TA 2022
1	Aset tak Berwujud	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp.0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2022	0

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/Amor-
tisasi Aset Lainnya
:
Rp.0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek :
Rp.8,391,840*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.8,391,840 dan Rp.5,458,730. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 28 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	8,391,840	3,465,397
Pendapatan Diterima Dimuka	0	1,993,333
Jumlah	8,391,840	5,458,730

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga:
Rp.8,391,840*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.8,391,840 dan Rp.3,465,397 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tinggi Bengkulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja Uang Makan Pegawai	287,000	Adalah Belanja Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2023 yang Belum Dibayarkan
2.	Belanja Gaji PPPK	7,137,900	Adalah Belanja Gaji PPPK Bulan Desember 2023 yang Belum Dibayarkan
3.	Beban Langganan Telepon	134,040	Adalah Beban Langganan Telepon Bulan

		Desember 2023	
4.	Beban Langganan PDAM	832,900	Adalah Beban Langganan Air Bulan Desember 2023
Jumlah		8,391,840	

C.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Utang yang Belum
Ditagihkan:
Rp.0

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.1,993,333 . Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pengadilan Tinggi Bengkulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	-----	0	-----
Jumlah		0	

C.4.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp.0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
34,724,123,156

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.34,724,123,156 dan Rp.35,154,397,269. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNbP
: Rp.34,765,936*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.34,765,936 dan Rp.27,430,980. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 31 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	24,478,000	34,765,936	142.03
Total Pendapatan		24,478,000	34,765,936	142.03

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai :
Rp.18,007,723,139*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.18,007,723,139 dan Rp.17,030,078,233 .

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 17 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	4,246,611,140	4,397,564,752	(150,953,612)	(3.43)
Beban Pembulatan Gaji PNS	58,236	56,004	2,232	3.99
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	329,200,480	346,973,556	(17,773,076)	(5.12)

Beban Tunj. Anak PNS	68,918,298	62,861,169	6,057,129	9.64
Beban Tunj. Struktural PNS	91,845,000	93,565,000	(1,720,000)	(1.84)
Beban Tunj. Fungsional PNS	9,573,402,000	8,616,164,000	957,238,000	11.11
Beban Tunj. PPh PNS	1,809,863,505	1,678,281,932	131,581,573	7.84
Beban Tunj. Beras PNS	182,867,580	188,081,820	(5,214,240)	(2.77)
Beban Uang Makan PNS	573,064,000	601,610,000	(28,546,000)	(4.74)
Beban Tunjangan Umum PNS	49,555,000	51,920,000	(2,365,000)	(4.56)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,075,200,000	993,000,000	82,200,000	8.28
Beban Gaji Pokok PPPK	5,933,000	0	5,933,000	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	60	0	60	0
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,060,000	0	1,060,000	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	144,840	0	144,840	0
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	18,007,723,139	17,030,078,233	977,644,906	5.74

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
: Rp.73,687,100*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.73,687,100 dan Rp.87,046,000 .

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	73,687,100	87,046,000	(13,358,900)	(15.35)
-----	0	0	0	0,00
Total Beban Persediaan	73,687,100	87,046,000	(13,358,900)	(15.35)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang &
Jasa :
Rp.1,876,521,980*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1,876,521,980 dan Rp.1,925,351,626. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	618,961,643	611,142,620	7,819,023	1.28
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,207,000	14,126,975	(3,919,975)	(27.75)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	84,468,000	65,232,000	19,236,000	29.49
Beban Barang Operasional Lainnya	71,926,366	80,030,530	(8,104,164)	(10.13)
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	0	25,977,500	(25,977,500)	(100)
Beban Bahan	0	31,293,950	(31,293,950)	(100)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	77,177,000	11,598,000	65,579,000	565.43
Beban Langganan Listrik	0	192,213,782	(192,213,782)	(100)
Beban Langganan Telepon	1,487,540	1,706,526	(218,986)	(12.83)
Beban Langganan Air	5,317,300	3,731,700	1,585,600	42.49
Beban Sewa	967,127,131	868,736,003	98,391,128	11.33
Beban Jasa Profesi	0	5,600,000	(5,600,000)	(100)
Beban Jasa Lainnya	1,600,000	2,800,000	(1,200,000)	(42.86)
Beban Jasa–Penanganan Pandemi COVID-19	0	8,643,000	(8,643,000)	(100)
Total Beban Barang dan Jasa	1,876,521,980	1,925,351,626	(48,829,646)	(2.54)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp.895,726,006*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.895,726,006 dan Rp.749,473,251 . Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	430,773,255	306,132,168	124,641,087	40.71
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	109,873,640	99,960,000	9,913,640	9.92
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	337,688,252	323,534,682	14,153,570	4.37
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	17,390,859	19,846,401	(2,455,542)	(12.37)
Total Beban Pemeliharaan	895,726,006	749,473,251	146,252,755	19.51

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp.25,118,190

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.25,118,190 dan Rp.444,956,909 . Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	207,918,190	207,286,909	631,281	0.30
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	7,200,000	7,050,000	150,000	2.13
Beban Perjalanan Paket Meeting dalam Kota	0	230,620,000	(230,620,000)	(100)
Total Beban Perjalanan Dinas	215,118,190	444,956,909	(229,838,719)	(51.65)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan

untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.787,930,954

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.787,930,954 dan Rp.847,978,779. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	247,568,528	296,137,928		
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	540,362,426	540,362,426		
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	0	11,478,425		
Jumlah Penyusutan	787,930,954	847,697,014	85,936,291	11.28
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	787,930,954	847,697,014	85,936,291	11.28

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain :
Rp.0.*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non Operasional :
Rp.0*

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
--------	------------	---------	-------------	---

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	(24,126,843)	24,126,843	(100)0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	70,645,884	(70,645,884)	(100)
Total Surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	46,519,041	(46,519,041)	(100)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp.35,060,396,979* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.35,060,396,979 dan Rp.35.091.699.254 .

E.2. Surplus (Defisit) LO

*Surplus(defisit) LO :
Rp.(21,821,941,433)* Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.(21,821,941,433) dan Rp.(21,010,934,777). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi
/Kesalahan
mendasar : Rp.0.* Tidak terdapat transaksi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

E.4. Koreksi Menambah/Mengurangi

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset : Rp.0.* Nilai Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan : Rp.0* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada

periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap : Rp.0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi: Rp0,-

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp..(75,120,895,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 5 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-
lain : Rp.0

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, piutang dan

utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 .

Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Utang	0
Koreksi Hibah	0
Total Koreksi Lain-lain	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas :
Rp.21,485,667,610

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21,485,667,610 dan Rp21,054,753,397.

Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	21,417,958,963
Diterima dari Entitas Lain	(32,772,603)
Transfer Keluar	(0)
Transfer Masuk	91,481,250
Pengesahan Hibah Langsung	9,000,000
Jumlah	21,485,667,610

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar

entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp.(32,772,603) sedangkan DKEL sebesar Rp.21,417,958,963.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Terdapat transaksi Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Tabel 48 Rincian Transfer Masuk
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
1 Unit Scanner	Badan Urusan Administrasi MA RI	19,850,000
1 Unit Server	Badan Urusan Administrasi MA RI	84,700,000
Jumlah		91,481,250

Transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.9,000,000 dari total Rp.9,000,000 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Pengesahan Hibah
(dalam satuan Rupiah)

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
Mula Pangaribuan, SH., MH	2 Unit Water Heater	9,000,000
	Total Pengesahan	9,000,000
	Pengesahan Pengembalian Hibah	0
	Jumlah	9,000,000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2022 disajikan pada lampiran.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah *Rp.34,724,123,156* masing-masing sebesar Rp.34,724,123,156 dan Rp.35,577,179,388 .

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan tahun ini maupun semester lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pendapatan dan Belanja secara Akrual yang dapat dijabarkan pada Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Belanja Uang Makan Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp.287,000,- adalah Belanja Uang Makan Pegawai an. Syahlan, SH., MH yang belum diterima untuk Bulan Desember 2023.
2. Belanja Gaji PPPK yang Belum Dibayar sebesar Rp.7,137,950,- an. Serli Herlina, S.M dan Donal, S.E yang belum diterima untuk Bulan Desember 2023
3. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp.966,940,- terdiri dari Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2023 sebesar Rp.134,040,- dan Beban Langganan PDAM Bulan Desember 2023 sebesar Rp.832,900,-.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

Rekening Virtual Account pada BRI Cabang Bengkulu A/653244005121000 A.n BPG 016 PENGADILAN TINGGI BENGKULU yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-2732/WPB.12/KP.06/2020 Tanggal 16 Oktober 2020.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-2 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK Tanggal 14 Februari 2023
2. Revisi DIPA ke-3 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 17 April 2023
3. Revisi DIPA ke-4 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 19 Juni 2023
4. Revisi DIPA KE-5 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 10 Juli 2023
5. Revisi DIPA ke-6 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 21 Agustus 2023
6. Revisi DIPA ke-7 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 4 September 2023

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM yang dapat dilaporkan dalam laporan keuangan Semester II TA 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Nomor SPM : **00098A PENGADILAN TINGGI BENGKULU**
Tanggal SPM : **25 Mei 2023**
Yang telah diterbitkan SP2D :
Nomor SP2D : **230161301006659**
Tanggal SP2D : **30 Mei 2023**
Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan
Sebelumnya 811131 & 811135
Menjadi 425999

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Bengkulu
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin		5,294,877,665	4,320,539,961	974,337,704
1.	Alat Bantu	7	0	0	0
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1,318,683,912	1,318,683,912	0
3.	Alat Ukur	5	0	0	0
4.	Alat Kantor	5	1,294,139,096	1,279,012,096	15,127,000
5.	Alat Rumah Tangga	5	606,828,078	573,952,178	32,875,900
6.	Alat Studio	5	35,306,000	24,714,200	10,591,800
7.	Alat Komunikasi	5	27,096,100	24,977,830	2,118,270
8.	Alat Kedokteran	5	0	0	0
9.	Peralatan Pemancar	10	396,500,000	39,650,000	356,850,000
10.	Komputer Unit	4	963,483,429	668,979,967	294,503,462
11.	Peralatan Komputer	4	258,221,000	135,601,250	122,619,750
12.	Unit Peralatan Proses/produksi	8	6,600,000	6,600,000	0
13.	Peralatan Olah Raga	3	800,000	800,000	0
B.	Gedung dan Bangunan		9,660,923,000	(4,277,811,058)	5,383,111,942
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	7,345,104,000	2,364,532,306	4,980,571,694
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2,315,819,000	1,372,736,326	943,082,674
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		18,680,950	0	18,680,950
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	18,680,950	0	18,680,950
2.	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	0	0
2.	Alat Kantor	5	0	0	0
3.	Alat Rumah Tangga	5	0	0	0
4.	Alat Studio	5	0	0	0
5.	Alat Komunikasi	5	0	0	0
6.	Komputer Unit	4	0	0	0

7. Peralatan Pemancar	8	0	0	0
8. Komputer Unit	4	0	0	0
9. Peralatan Komputer	4	0	0	0
10. Bahan Perpustakaan Tercetak	-	0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		14,974,481,615	8,598,351,019	6,376,130,596
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		14,974,481,615	8,598,351,019	6,376,130,596

*B. INFORMASI HIBAH
LANGSUNG BERUPA
UANG/BARANG/JASA*

**REKAPITULASI DATA PENERIMAAN HIBAH PENGADILAN TINGGI BENGKULU
UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023**

Bagian Anggaran : (005) Mahkamah Agung RI
 Eselon : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (2600) Bengkulu
 Satker : (400512) Pengadilan Tinggi Bengkulu

NO	GENERAL INFORMATION			LINE MINISTRY						DONOR										
	REGISTRATION NUMBER	PROJECT NAME	CODE SATKER	CASH DISBURSEMENT IN BANK ACCOUNT CURRENT YEAR			DISBURSEMENT CURRENT YEAR (SPHL/MPHLBIS)			DISBURSEMENT CURRENT YEAR			DISBURSEMENT CURRENT YEAR							
				VALUE DATE	CURRENCY	AMOUNT	DATE OF AUTHORIZATION	IDR	CSH	CURRENT FOREIGN CURRENCY	GOODS/SERVICES	VALUE DATE	CURRENCY	AMOUNT	GOODS/SERVICES	FOREIGN CURRENCY	IDR	NO. BAST		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				PENERIMAAN UANG MASUK REKENING TAHUN INI						PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI										
NO	NO REGISTER	NAMA PROJECT	KODE SATKER	TANGGAL PENERIMAAN HIBAH	MATA UANG	NILAI	NO REKENING	TANGGAL PENGESAHAN	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	NO SPHL/MPHLBIS	TANGGAL PEMBERIAN HIBAH	MATA UANG	NILAI	MATA UANG	VALAS	IDR	NO. BAST
1	2N77WYWA	PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H. BERUPA 2 (DUA) UNIT WATER HEATER RIMNAI 15L KEPADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU	400512					08-Des-23	IDR			9,000,000	00252T							2751/SEK.PT.W8-U/PL1.2.4/IX/2023
				JUMLAH																
				9,000,000																

